

Surat Kabar : Media Indonesia
Subyek : Karbon

Edisi : 24-Agus-2011
Halaman : 18

Mencium Wanginya Laba Berdagang Karbon

Perdagangan karbon tidak mendulang untung sebesar sawit dalam jangka pendek, tapi membawa laba besar dalam jangka panjang. Melestarikan hutan tidak hanya memberi manfaat bagi ekosistem, tapi juga bisa menghasilkan keuntungan seperti layaknya perusahaan. Salah satu sumber pendapatan pelestarian hutan adalah pasar karbon. Di pasar tersebut, perusahaan atau industri yang diwajibkan membatasi emisi karbon (karbon dioksida) terutama di negara-negara maju berperan sebagai pembeli. Adapun pemilik atau pengelola hutan menjadi penjualnya.

Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Iman Santoso mengatakan Indonesia yang memiliki hutan tropis sangat luas mampu menyerap 45% pasar karbon dunia. Untuk itu, Indonesia pun berpotensi mengatur harga karbon. Sayangnya, ketiadaan patokan harga membuat Indonesia belum siap terlibat perdagangan karbon. "Kita harus punya patokan harga sehingga tidak merugi dan tidak merugikan orang lain juga. Kalau kita banting harga murah, orang lain celaka juga. Dan kita harus ikuti harga pasar, jangan sampai di bawah harga pasar internasional. Sekarang katanya US\$30-US\$50 per ton karbon. Kan besar itu," ujar Iman se usai diskusi bertema Emisi rendah karbon, antara permasalahan ekonomi dan kehutanan di Jakarta, kemarin.

Dia menuturkan, perdagangan karbon memang tidak mendulang untung sebesar perkebunan sawit dalam jangka pendek. Namun, perdagangan karbon dapat membawa laba besar dalam jangka waktu panjang. "Kalau jangka panjang bahwa karbon selain memberikan uang juga akan mengamankan lingkungan. Kita bisa berpikir ulang," ujar Iman.

Selain harga karbon, lanjut Iman, pemerintah juga harus mengatur pembagian keuntungan dalam perdagangan karbon. Skema itu akan dibahas bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Dalam waktu dekat kami akan berbicara dengan Kemenkeu. Paling tidak merancang dulu seperti apa dan besarnya seperti apa," ujarnya.

Kita harus ikuti harga pasar, jangan sampai di bawah harga pasar internasional. Sekarang katanya US\$30-US\$50 per ton karbon."

Iman Santoso Dirjen Bina Usaha Kehutanan

Tunda kontrak

Iman mengatakan pemegang izin usaha restorasi ekosistem memiliki hak untuk berjualan karbon. Saat ini pemegang izin di Jambi dan Sumatra Selatan tengah melakukan itu. Namun, dia menyarankan para pemegang izin jangan mengadakan kontrak jual beli karbon dahulu dengan pihak lain hingga aturan rampung. "Tunggu aturan dulu baru bisa deal. Kalau Anda punya izin restorasi, ya jalan saja. Tapi untuk membuat kontrak, jangan dulu."

Iman menambahkan pemerintah juga harus berhati-hati jangan sampai kelebihan pasokan karena besarnya porsi hutan Indonesia. "Harus diwaspadai bermain dengan koboi-koboi. Kalau kita tidak hati-hati, kita oversuplai, kan kaya cukong-cukong," tandasnya.

Deputi 1 Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Heru - Prasetyo memaparkan karbon, sama seperti sawit, merupakan unsur ekonomi yang dapat menyumbang target pertumbuhan ekonomi 7% dan pengurangan emisi 26% pada 2020.

Secara terpisah, advisor kebijakan perubahan iklim dan ekonomi rendah karbon dari Universitas Indonesia Mubariq Ahmad menyatakan ada sembilan provinsi yang memiliki jumlah karbon besar. Kesembilan provinsi itu adalah Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat.